

## Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja Manajerial dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nur Syamsu<sup>1</sup>, Ruslan Ahmad<sup>2</sup>, Arifin Idrus<sup>3</sup>

STIEM Bongaya Makassar

[nursyamsu@stiem-bongaya.ac.id](mailto:nursyamsu@stiem-bongaya.ac.id)

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori. Populasi penelitian adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan program pembangunan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan jumlah responden sebanyak 37 orang. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran memiliki pengaruh paling dominan terhadap akuntabilitas kinerja. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,907 menunjukkan bahwa 90,7% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan melalui penetapan sasaran anggaran yang jelas, peningkatan kinerja manajerial aparatur, serta penguatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci:** kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, pelaporan anggaran, akuntabilitas kinerja pemerintah..

*Abstract: This study aims to examine the effect of budget goal clarity, managerial performance, and budget reporting/accountability on the performance accountability of government institutions. The research adopts a quantitative approach using an explanatory research design. The population of this study consists of employees of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Enrekang Regency who are involved in planning and managing regional development programs. A census sampling technique was employed, resulting in 37 respondents. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS statistical software. The results indicate that budget goal clarity, managerial performance, and budget reporting/accountability have a positive and significant effect on government performance accountability. Among the independent variables, budget reporting/accountability shows the most dominant influence on performance accountability. The coefficient of*

*determination ( $R^2$ ) value of 0.907 suggests that 90.7% of the variation in government performance accountability can be explained by the three independent variables included in the model. These findings imply that improving government performance accountability requires clearer budget targets, enhanced managerial capabilities of public officials, and strengthened budget reporting systems that promote transparency and accountability. The study contributes to the literature on public sector accountability and provides practical insights for local governments in strengthening performance-based governance practices.*

**Keywords:** *budget goal clarity, managerial performance, budget reporting, government performance accountability.*

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan transparan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Melalui implementasi SAKIP, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Mahmudi, 2019). Penerapan sistem tersebut juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur tingkat pencapaiannya. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan anggaran, pengukuran kinerja, serta mekanisme pelaporan kinerja yang belum berjalan secara optimal (Sofyani & Akbar, 2020). Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya kualitas informasi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah serta menghambat upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Salah satu faktor yang diyakini mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan dan target anggaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat dipahami oleh aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan organisasi dalam menetapkan indikator kinerja serta mengevaluasi pencapaian program yang telah dilaksanakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran

memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Kenis, 1979; Sofyani et al., 2020). Selain kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial juga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja manajerial berkaitan dengan kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan organisasi. Aparatur yang memiliki kinerja manajerial yang baik akan mampu mengelola sumber daya organisasi secara efektif serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Anthony & Govindarajan, 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja manajerial dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah (Rahayu & Setiawan, 2022).

Faktor lain yang juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Pelaporan anggaran merupakan proses penyampaian informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran serta capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sistem pelaporan yang transparan dan akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan (Halim & Kusufi, 2019). Selain itu, pelaporan yang baik juga memungkinkan adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Prabowo et al., 2020).

Dalam konteks pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah, mengoordinasikan program pembangunan antar organisasi perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan fungsi tersebut, Bappeda tidak hanya berperan dalam proses perencanaan anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja. Sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan kinerja daerah dan koordinasi program pembangunan, kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja di lingkungan Bappeda sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial aparatur, serta sistem pelaporan anggaran yang diterapkan di lingkungan Bappeda menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Misalnya, penelitian Sofyani dan Akbar (2020) menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja dan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain juga menemukan bahwa kinerja manajerial aparatur berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi

sektor publik serta kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah (Yuliansyah et al., 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada organisasi perangkat daerah secara umum atau pada instansi pengelola keuangan daerah. Penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada instansi yang memiliki fungsi perencanaan pembangunan daerah masih relatif terbatas. Padahal, sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan pembangunan dan koordinasi program daerah, Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi.

### ***Pengembangan Hipotesis Penelitian***

#### ***1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja***

Dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan dan target anggaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan mudah dipahami oleh aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sasaran anggaran yang jelas memungkinkan organisasi untuk menetapkan indikator kinerja yang tepat serta memudahkan proses evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan.

Menurut teori pengendalian manajemen, kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan motivasi aparatur dalam mencapai target organisasi karena aparatur memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang harus dicapai. Kenis (1979) menyatakan bahwa sasaran anggaran yang jelas akan meningkatkan efektivitas kinerja manajerial karena individu mengetahui secara pasti standar kinerja yang diharapkan. Dalam konteks sektor publik, kejelasan sasaran anggaran juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap penggunaan anggaran dapat dikaitkan secara langsung dengan pencapaian tujuan organisasi.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sofyani dan Akbar (2020) menemukan bahwa organisasi sektor publik yang memiliki sasaran anggaran yang jelas cenderung memiliki sistem pengukuran kinerja yang lebih baik serta tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahayu dan Setiawan (2022) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### *2. Pengaruh Kinerja Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Kinerja manajerial merupakan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kinerja manajerial yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Aparatur yang memiliki kinerja manajerial yang baik akan mampu mengelola sumber daya organisasi secara optimal serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja. Hal ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. Anthony dan Govindarajan (2017) menyatakan bahwa kinerja manajerial yang baik dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen serta mendorong pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien.

Dalam konteks sektor publik, peningkatan kinerja manajerial juga dapat memperkuat akuntabilitas organisasi karena aparatur yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu menyusun perencanaan program yang lebih efektif serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan organisasi sektor publik serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin baik kinerja manajerial aparatur dalam suatu organisasi pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### *3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Pelaporan anggaran merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas publik karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan capaian kinerja organisasi. Melalui pelaporan anggaran, pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bagaimana anggaran yang telah dialokasikan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. Pelaporan anggaran yang transparan dan akurat memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran serta menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (Halim & Kusufi, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas organisasi sektor publik. Prabowo et al. (2020) menemukan bahwa sistem pelaporan yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah serta memperkuat

mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, penelitian Agustin dan Wibowo (2023) juga menunjukkan bahwa pelaporan anggaran yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori (explanatory research). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui analisis statistik. Metode eksplanatori dipilih karena penelitian ini berupaya menjelaskan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian kuantitatif dalam sektor publik banyak digunakan untuk menguji hubungan antar variabel organisasi melalui pengukuran yang bersifat objektif dan terstruktur (Sekaran & Bougie, 2016). Dengan pendekatan ini, hubungan antar variabel dapat dianalisis secara empiris menggunakan teknik analisis statistik.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Instansi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan program pembangunan, serta koordinasi perencanaan antar organisasi perangkat daerah. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah sehingga relevan dengan kajian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang yang terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan program, serta penganggaran kegiatan organisasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (census sampling), yaitu teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian. Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil sehingga seluruh anggota populasi dapat dijadikan responden penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Bappeda Kabupaten Enrekang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel yang dikembangkan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

**Tabel 1. Uji Validitas Variabel X1**

Item Pernyataan	R <sub>hitung</sub>	Keterangan
1	0,863	Valid
2	0,660	Valid
3	0,551	Valid
4	0,463	Valid
5	0,380	Valid
6	0,501	Valid
7	0,399	Valid

**Tabel 2. Uji Validitas Variabel X2**

Item Pernyataan	R <sub>hitung</sub>	Keterangan
1	0,637	Valid
2	0,780	Valid
3	0,562	Valid
4	0,432	Valid
5	0,570	Valid
6	0,588	Valid
7	0,743	Valid
8	0,589	Valid

**Tabel 3. Uji Validitas Variabel X3**

Item Pernyataan	R <sub>hitung</sub>	Keterangan
1	0,614	Valid
2	0,703	Valid
3	0,487	Valid
4	0,451	Valid

**Tabel 4. Uji Validitas Variabel Y**

Item Pernyataan	R <sub>hitung</sub>	Keterangan
1	0,510	Valid
2	0,830	Valid
3	0,437	Valid
4	0,929	Valid

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5%. Nilai r tabel ditentukan berdasarkan degree of freedom (df) = n - 2, dengan jumlah sampel sebanyak 37

responden sehingga diperoleh  $df = 35$ . Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,363.

Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari 0,363 sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Pada variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ) terdapat tujuh item pernyataan dengan nilai  $r$  hitung berkisar antara 0,380 hingga 0,863, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Selanjutnya pada variabel kinerja manajerial ( $X_2$ ) terdapat delapan item pernyataan dengan nilai  $r$  hitung antara 0,432 hingga 0,780, yang juga menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid.

Pada variabel pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran ( $X_3$ ) terdapat empat item pernyataan dengan nilai  $r$  hitung berkisar antara 0,451 hingga 0,703, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Demikian pula pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $Y$ ) yang terdiri dari empat item pernyataan dengan nilai  $r$  hitung antara 0,437 hingga 0,929, yang seluruhnya juga lebih besar dari  $r$  tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas sehingga layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

*Uji Reliabilitas*

**Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ )	0,837	Reliabel
Kinerja Manajerial ( $X_2$ )	0,756	Reliabel
Pelaporan/Pertanggungjawaban ( $X_3$ )	0,701	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja ( $Y$ )	0,822	Reliabel

*Analisis Regresi Linear Berganda*

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

No.	Variabel	Koefisien Regresi ( $\beta$ )	Nilai Fhitung	Sig.
1.	Constanta	-0,717	106,882	0,000
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ )	0,305		
3.	Kinerja Manajerial ( $X_2$ )	0,248		
4.	Pelaporan/Pertanggungjawaban ( $X_3$ )	0,605		

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), kinerja manajerial ( $X_2$ ), serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,717 + 0,305X_1 + 0,248X_2 + 0,605X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki koefisien regresi positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Koefisien regresi untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) sebesar 0,305, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebesar 0,305 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi variabel kinerja manajerial (X2) sebesar 0,248, yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja manajerial akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, variabel pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,605, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh paling besar terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

*Koefisien Determinasi*

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai R = 0,952, yang berarti bahwa hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada pada kategori sangat kuat. Selanjutnya nilai R<sup>2</sup> = 0,907 menunjukkan bahwa sebesar 90,7% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu, sisanya sebesar 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

*Pengujian Hipotesis (Uji t)*

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

**Tabel 7. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji-t)**

No.	Variabel	Nilai t hitung	Sig.	Kesimpulan
1.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	2,445	0,020	Signifikan
2.	Kinerja Manajerial (X2)	2,089	0,045	Signifikan
3.	Pelaporan/Pertanggungjawaban (X3)	5,328	0,000	Signifikan

1. Kejelasan sasaran anggaran (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,445 dengan nilai signifikansi 0,020. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja manajerial (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,089 dengan nilai signifikansi 0,045. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 5,328 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

## **Pembahasan**

### *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan dalam organisasi, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan aparatur pemerintah memahami tujuan dan target program yang harus dicapai sehingga pelaksanaan kegiatan organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, proses evaluasi kinerja juga dapat dilakukan secara lebih objektif karena indikator kinerja yang digunakan telah ditetapkan secara jelas sejak awal. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengendalian manajemen yang menyatakan bahwa sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan kinerja organisasi serta memperkuat mekanisme akuntabilitas publik.

### *Pengaruh Kinerja Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Aparatur yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengelola sumber daya organisasi secara optimal serta memastikan bahwa setiap program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparan kepada masyarakat.

### *Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel ini juga memiliki nilai koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa pelaporan anggaran merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaporan anggaran yang transparan dan akurat memungkinkan adanya evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta pencapaian program yang telah dilaksanakan. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan dalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan aparatur pemerintah memahami tujuan dan target yang harus dicapai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Kedua, kinerja manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas organisasi. Aparatur yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengelola sumber daya organisasi secara efektif serta memastikan bahwa setiap program dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel ini juga terbukti memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan anggaran yang transparan, akurat, dan tepat waktu merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Melalui sistem pelaporan yang baik, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran merupakan faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

### **Implikasi Penelitian**

#### *Implikasi Teoritis*

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini memperkuat teori pengendalian manajemen yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran organisasi dan sistem pengelolaan kinerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta memperkuat mekanisme akuntabilitas publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa pelaporan anggaran memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

#### *Implikasi Praktis*

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan menetapkan sasaran anggaran yang lebih jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh seluruh aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan.
2. Peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang manajerial perlu terus dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar aparatur mampu menjalankan fungsi manajemen secara lebih efektif.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran agar informasi mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja dapat disampaikan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.

#### *Keterbatasan Penelitian*

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan pada instansi pemerintah daerah lainnya.
2. Kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, serta pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang kemungkinan juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, budaya organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi.
3. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain serta memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah daerah yang berbeda.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustin, H., & Wibowo, A. (2023). Budget transparency and accountability in public sector organizations. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 215–231. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0021>
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2020). Implementing performance measurement systems in Indonesian local government. *Public Administration and Development*, 40(3), 156–167. <https://doi.org/10.1002/pad.1860>
- Alcaide-Muñoz, L., Rodríguez-Bolívar, M. P., & López-Hernández, A. M. (2021). Transparency and accountability in public sector management. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101574. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101574>
- Bianchi, C., & Rivenbark, W. (2021). Performance management systems in public administration. *Public Performance & Management Review*, 44(5), 1043–1065. <https://doi.org/10.1080/15309576.2021.1879737>

- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2021). Public sector accounting and accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(3), 1023–1040. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4680>
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2020). Accountability and transparency in government performance management. *Public Money & Management*, 40(3), 195–203. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1598195>
- Hood, C., & Dixon, R. (2020). Performance measurement and public sector accountability. *Public Administration*, 98(1), 45–60. <https://doi.org/10.1111/padm.12601>
- Kurniawan, B., & Putri, D. (2022). Regional development planning and government accountability. *Journal of Regional Development Studies*, 18(2), 120–134. <https://doi.org/10.2139/jrds.2022.18.2.120>
- Lapsley, I., & Miller, P. (2021). Transforming public sector governance through accountability systems. *Financial Accountability & Management*, 37(4), 381–395. <https://doi.org/10.1111/faam.12269>
- Mahmudi, M., & Mardiasmo, M. (2021). Public sector performance measurement and accountability in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.01>
- Prabowo, H., Cooper, K., & Leung, P. (2020). Accountability in public sector organizations. *Public Money & Management*, 40(5), 365–372. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714203>
- Rahayu, S., & Setiawan, D. (2022). Managerial performance and public sector accountability. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 210–223. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2021-0150>
- Rodríguez-Bolívar, M. P., Navarro-Galera, A., & Alcaide-Muñoz, L. (2021). Determinants of government transparency and accountability. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101615. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101615>
- Sari, R., & Halim, A. (2021). Budget clarity and government performance accountability. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.19>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2020). Determinants of local government performance accountability in Indonesia. *Public Organization Review*, 20(4), 673–692. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00442-9>
- Sofyani, H., Riyadh, H., & Fahlevi, H. (2020). Improving government performance accountability systems. *Public Administration Issues*, 5(3), 85–101. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2020-0-3-85-101>
- Steccolini, I., Saliterer, I., & Guthrie, J. (2021). Public sector accountability and governance reforms. *Accounting Forum*, 45(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1836754>
- Tambulasi, R. (2020). Accountability mechanisms in local governments. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 529–544. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2020-0072>

- Tavares, A., & da Cruz, N. F. (2020). Transparency, accountability, and citizen trust in government. *Local Government Studies*, 46(4), 589–610. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1709515>
- Utama, I. G. B., & Sari, M. M. R. (2022). Budget participation and government performance accountability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(1), 15–28. <https://doi.org/10.9744/jak.24.1.15-28>
- Wang, X., & Berman, E. (2020). Performance measurement in public administration. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 655–677. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1683954>
- Yuliansyah, Y., Rammal, H., & Rose, E. (2021). Performance management in public sector organizations. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(2), 289–308. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2020-0098>
- Zhang, Y., & Gao, J. (2021). Government performance evaluation and accountability mechanisms. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 756–772. <https://doi.org/10.1177/0020852320919071>
- Zhou, Y., & Miao, Q. (2022). Public sector performance management and accountability. *Public Administration Review*, 82(3), 498–511. <https://doi.org/10.1111/puar.13428>